



**MANUAL PENETAPAN TARGET
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**

**KERJASAMA
DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2004**

**MANUAL PENETAPAN TARGET
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**

**KERJASAMA
DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG 2004**

MANUAL PENETAPAN TARGET PKB DAN BBNKB DI PROPINSI JAWA BARAT

PENDAHULUAN

- Penerimaan daerah propinsi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sementara itu pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Salah satu sumber pendapatan asli daerah propinsi adalah pajak daerah yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Diantara ke empat jenis pajak daerah propinsi tersebut, PKB dan BBNKB merupakan dua jenis pajak yang mempunyai potensi sangat besar.
- Berdasarkan data empirik beberapa tahun yang lalu, di Propinsi Jawa Barat realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PKB dan BBNKB dari tahun ke tahun terus berkembang meskipun data empirik juga menunjukkan masih terdapat potensi PKB dan BBNKB yang belum tergali. Potensi PKB yang belum

tergali tersebut berdasarkan perkiraan sementara berkisar antara 10 s.d. 16 %. Secara hipotetik faktor penyebab hal ini bukan saja bersumber dari wajib pajak itu sendiri melainkan disebabkan oleh kelemahan sistem pemungutan dan pengadministrasian pajak, termasuk juga adanya penyimpangan dari sebagian oknum aparat pelaksana pengadministrasian dan pemungutan pajak.

- Selain kedua kelemahan tersebut satu hal penting yang diduga berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBNKB adalah sistem perencanaan yang dinilai masih sangat lemah. Selama ini target penerimaan PKB dan BBNKB secara umum sering ditetapkan atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang kurang memperhatikan faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB tersebut.
- Karena penetapan target tidak dilakukan dengan tepat maka upaya untuk merealisasikannya pun menjadi tidak akurat. Jika target ditetapkan tidak didasarkan pertimbangan faktor-faktor strategis yang mempengaruhinya, maka sangat mungkin target ditetapkan jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya, atau sebaliknya jauh lebih tinggi dari potensi tersebut. Apabila target ditetapkan jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya, akan menyebabkan upaya untuk menggali potensi yang dimiliki tidak optimal, karena dengan upaya yang minimal pun target dapat tercapai bahkan terlampaui. Sebaliknya, jika target ditetapkan jauh lebih tinggi dari potensi yang sebenarnya, maka akan memberikan penilaian kurang baik terhadap kinerja organisasi dalam hal ini UPPD dan DIPENDA.

PRINSIP-PRINSIP

1. *Sederhana, artinya bahwa model yang dibuat mudah diaplikasikan oleh semua pihak yang berkepentingan. Mudah bukan hanya dalam pengertian teknis, melainkan dalam pencarian data yang diperlukan.*
2. *Universal, artinya bahwa model tersebut dapat diterapkan di seluruh UPPD di Propinsi Jawa Barat.*
3. *Data tersedia dan mudah untuk didapatkan. Artinya, bahwa data tersebut secara teknis dapat dengan mudah dan cepat untuk diperoleh oleh setiap UPPD dan Dipenda.*
4. *Penting (Significant) secara metodologis: (1) Uji "t" untuk pengaruh parsial; (2) Uji "F" untuk pengaruh total; (3) Koefisien Determinasi untuk melihat besarnya pengaruh; (4) Dan tidak bertentangan dengan teori atau logika.*

- Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan DIPENDA bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara pada Tahun 2002, yang menyimpulkan bahwa meskipun prosentase realisasi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap target menunjukkan rasio yang sangat baik, namun kualitas pelayanan masih relatif rendah. Rendahnya kualitas pelayanan diduga disebabkan oleh beberapa permasalahan, yang diantaranya adalah penetapan target yang tidak benar.

tergali tersebut berdasarkan perkiraan sementara berkisar antara 10 s.d. 16 %. Secara hipotetik faktor penyebab hal ini bukan saja bersumber dari wajib pajak itu sendiri melainkan disebabkan oleh kelemahan sistem pemungutan dan pengadministrasian pajak, termasuk juga adanya penyimpangan dari sebagian oknum aparat pelaksana pengadministrasian dan pemungutan pajak.

- Selain kedua kelemahan tersebut satu hal penting yang diduga berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBNKB adalah sistem perencanaan yang dinilai masih sangat lemah. Selama ini target penerimaan PKB dan BBNKB secara umum sering ditetapkan atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang kurang memperhatikan faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB tersebut.
- Karena penetapan target tidak dilakukan dengan tepat maka upaya untuk merealisasikannya pun menjadi tidak akurat. Jika target ditetapkan tidak didasarkan pertimbangan faktor-faktor strategis yang mempengaruhinya, maka sangat mungkin target ditetapkan jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya, atau sebaliknya jauh lebih tinggi dari potensi tersebut. Apabila target ditetapkan jauh lebih rendah dari potensi yang sebenarnya, akan menyebabkan upaya untuk menggali potensi yang dimiliki tidak optimal, karena dengan upaya yang minimal pun target dapat tercapai bahkan terlampaui. Sebaliknya, jika target ditetapkan jauh lebih tinggi dari potensi yang sebenarnya, maka akan memberikan penilaian kurang baik terhadap kinerja organisasi dalam hal ini UPPD dan DIPENDA.

ASUMSI DAN KRITERIA

1. Data yang dipergunakan diasumsikan berdistribusi normal, sehingga, tidak dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data;
2. Tingkat kepercayaan (confidence level) 95% atau tingkat signifikansi (significant level) dalam setiap pengujian adalah 5%;
3. Pengujian hanya dilakukan terhadap keberpengaruhan setiap variabel independen (regressor) terhadap variabel dependen (tergantung) secara parsial dengan menggunakan uji Student (uji-t) dan secara total dengan uji Fisher (uji-F)
4. Oleh karena model yang dirumuskan hanya akan digunakan untuk keperluan prediksi atau penetapan target berdasarkan variabel-variabel yang dapat dikontrol (oleh DIPENDA), maka pelanggaran terhadap berbagai asumsi klasik diabaikan. Berbagai asumsi klasik tersebut adalah: (1) Multikolinearitas, yaitu adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel penjelas (regressor); (2) Heteroskedastisitas, yaitu adanya perbedaan variance dari variabel residu; (3) Autokorelasi, yaitu adanya hubungan atau korelasi antara nilai-nilai observasi dalam waktu yang berbeda (jika data time series) atau antara nilai-nilai observasi dalam tempat yang berbeda (jika data cross section).

MODEL

Target Fisik PKB

$$JKT(t) = \alpha_1.JKT(t-1) + \alpha_2.JKT(t-2) + \alpha_3.JKT(t-3) \dots (1)$$

$$JKTP(t) = JKT(t) \times I(pkb)$$

Target Fisik BBNKB I

$$JKB(t) = \beta_1.JKTP(t) \dots (2)$$

$$JKBP(t) = JKB(t) \times I(bbnkb I)$$

Target Fisik BBNKB II

$$JKO(t) = \gamma_1.JKT(p) \dots (3)$$

$$JKOP(t) = JKO(t) \times I(bbnkb II)$$

Target Penerimaan PKB

$$PKB(t) = \phi_1.JKT(t) \dots (4)$$

$$PKBP(t) = PKB(t) \times RT(pkb, t)$$

Target Penerimaan BBNKB I

$$BBNKB I(t) = \delta_1.JKB(t) \dots (5)$$

$$BBNKB I P(t) = BBNKB I(t) \times RT(bbnkb I, t)$$

Target Penerimaan BBNKB II

$$BBNKB II(t) = \lambda_1.JKPT(t) \dots (6)$$

$$BBNKB II P(t) = BBNKB II(t) \times RT(bbnkb II, t)$$

KETERANGAN NOTASI

JKT (t)	= Jumlah Kendaraan Total Tahun (t)
JKT (t-1)	= Jumlah Kendaraan Total Tahun (t-1)
JKT (t-2)	= Jumlah Kendaraan Total Tahun (t-2)
JKT (t-3)	= Jumlah Kendaraan Total Tahun (t-3)
JKTP (t)	= Jumlah Kendaraan Total Potensi Tahun (t)
JKB (t)	= Jumlah Kendaraan Baru Tahun (t)
JKBP (t)	= Jumlah Kendaraan Baru Potensi Tahun (t)
JKO (t)	= Jumlah Kendaraan Pindah Tangan Tahun (t)
JKOP (t)	= Jumlah Kendaraan Pindah Tangan Potensi Tahun(t)
PKB (t)	= Nilai Rupiah PKB Tahun (t)
PKBP (t)	= Nilai Rupiah PKB Potensi Tahun (t)
BBNKB I (t)	= Nilai Rupiah BBNKB I Tahun (t)
BBNKB I P (t)	= Nilai Rupiah BBNKB I Potensi Tahun (t)
BBNKB II (t)	= Nilai Rupiah BBNKB II Tahun (t)
BBNKB II P (t)	= Nilai Rupiah BBNKB II Potensi Tahun (t)
I (pkb, t)	= Indeks PKB Tahun (t)
I (bbnkb I, t)	= Indeks BBNKB I Tahun (t)
I (bbnkb II, t)	= Indeks BBNKB II Tahun (t)
RT (pkb, t)	= Rasio Tarif PKB Tahun (t) Thd Tahun Dasar (2003)
RT (bbnkb I, t)	= Rasio Tarif BBNKB I Tahun (t) Thd Tahun Dasar
RT (bbnkb II, t)	= Rasio Tarif BBNKB II Tahun (t) Thd Tahun Dasar

- Indeks PKB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara prediksi jumlah kendaraan pada tahun 2003 dengan jumlah kendaraan yang sebenarnya pada tahun 2003. Angka ini merupakan tingkat penyimpangan prediksi dari trend linear yang berhasil dibangun, dan dianggap mencerminkan perbedaan karakteristik antar daerah, khusus dalam PKB.
- Indeks BBNKB I adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara prediksi jumlah kendaraan baru pada tahun 2003 dengan jumlah kendaraan baru yang sebenarnya pada tahun 2003. Angka ini merupakan tingkat penyimpangan prediksi dari trend linear yang berhasil dibangun, dan dianggap mencerminkan perbedaan karakteristik antar daerah, khusus dalam BBNKB I.
- Indeks BBNKB II adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara prediksi jumlah kendaraan yang pindah tangan (transaksi internal ditambah mutasi masuk) pada tahun 2003 dengan jumlah kendaraan pindah tangan yang sebenarnya pada tahun 2003. Angka ini merupakan tingkat penyimpangan prediksi dari trend linear yang berhasil dibangun, dan dianggap mencerminkan perbedaan karakteristik antar daerah, khusus dalam BBNKB II.

PENETAPAN TARGET

Untuk keperluan penetapan target PKB, BBNKB I, dan BBNKB II, baik untuk target potensi fisik maupun target potensi penerimaan, dibuat 3 (tiga skenario) yaitu target optimis, target moderat, dan target pesimis.

- Target optimis dapat digunakan jika dilakukan kebijakan atau upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB maupun BBNKB;
- Target moderat dapat digunakan jika tidak dilakukan kebijakan atau upaya lain kecuali sama dengan tahun-tahun sebelumnya;
- Target pesimis dapat digunakan jika terjadi hal-hal yang diprediksikan akan mengurangi penerimaan PKB maupun BBNKB.

LANGKAH PENETAPAN TARGET

1. **SIAPKAN** data tentang Jumlah Kendaraan Riil (yang sebenarnya) per jenis selama tiga tahun terakhir. Misalnya, jika ingin menetapkan target untuk Tahun 2005, maka data yang harus disiapkan adalah jumlah setiap jenis kendaraan pada tahun 2002, 2003, dan 2004.
2. **BUKA** Program Excel pada komputer Bapak/Ibu, dan buka file "Penetapan Target". Pada file tersebut akan nampak 4 lembar kerja (sheet), yaitu sheet input, sheet optimis, sheet moderat, dan sheet pesimis.
3. **BUKA** lembar (sheet) input pada file tersebut, lalu masukan data jumlah kendaraan sebagai berikut (Misal untuk penetapan target tahun 2005)
 - Kolom "B" untuk jumlah kendaraan Tahun (t-1), dalam hal ini tahun 2004.
 - Kolom "C" untuk jumlah kendaraan Tahun (t-2), dalam hal ini tahun 2003.
 - Kolom "D" untuk jumlah kendaraan Tahun (t-3), dalam hal ini tahun 2002.
4. Masih pada lembar (sheet) input, **MASUKAN** Indeks PKB, Indeks BBNKB I, dan Indeks BBNKB II sesuai dengan daerah yang akan ditetapkan targetnya. Indeks PKB, Indeks BBNKB I, dan Indeks BBNKB II dapat dilihat pada lampiran buku manual ini.
5. Juga masih pada lembar (sheet) input, **MASUKKAN** tarif PKB, tarif BBNKB I, dan Tarif BBNKB II yang akan diberlakukan pada tahun dimana target akan ditetapkan.
6. Setelah memasukan data selesai, Bapak/Ibu **LANGSUNG BISA** melihat berapa target yang seharusnya ditetapkan pada tahun 2005, dengan membuka sheet optimis, moderat, dan pesimis.

Lembar Kerja Penetapan Target PKB dan BBNKB

Jenis Kendaraan	JKR (t-1)	JKR (t-2)	JKR (t-3)	Indeks PKB	Indeks BBN I	Indeks BBN 2	Tarif PKB	Tarif BBN 1	Tarif BBN 2	Target Fisik PKB	Target Penerimaan PKB	Target Fisik BBN 1	Target Penerimaan BBN 1	Target Fisik BBN 2	Target Penerimaan BBN 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
Sedan															
Jeep															
Minibus															
Bus															
Truk															
Alat Berat															
Total Roda 4															
Sepeda Motor															

Keterangan:

JKR = Jumlah Kendaraan RII (yang sebenarnya)

PENUTUP

Model penetapan target ini dapat digunakan selama tidak ada perubahan kebijakan atau hal-hal lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap PKB dan BBNKB. Jika terjadi perubahan yang signifikan, maka perlu dilakukan pengkajian ulang dan perumusan kembali model yang disesuaikan dengan perubahan tersebut.

LAMPIRAN

1. Indeks PKB

No	Kabupaten/Kota	Sedan	Jeep	Minibus	Bus	Truk	Alat Berat	Motor
1	Kota Depok	0.96	0.99	1.06	1.54	0.82	0.00	0.95
2	Kab. Bogor	0.94	1.02	1.13	1.25	0.87	0.00	0.90
3	Kota Bogor	0.95	0.80	0.89	0.66	0.79	0.53	0.82
4	Kota Sukabumi	0.85	0.80	0.88	1.06	1.04	1.00	0.96
5	Kab. Sukabumi	1.03	1.35	0.94	0.51	1.37	1.00	1.14
6	Kab. Cianjur	0.94	0.82	1.12	0.49	0.83	1.00	0.73
7	Kab/Kota Bekasi	1.01	1.04	1.01	1.16	1.06	1.00	1.03
8	Kab. Karawang	0.83	0.86	1.07	0.88	0.92	0.00	0.85
9	Kab. Purwakarta	0.85	0.88	0.89	1.18	0.90	1.00	0.91
10	Kab. Subang	0.72	0.77	0.80	1.08	0.95	0.00	0.86
11	Kota Cirebon	0.95	0.89	0.99	0.94	0.93	0.00	0.97
12	Kab Cirebon	0.95	0.85	0.91	1.09	0.99	1.00	1.02
13	Kab. Indramayu	1.00	0.84	0.92	1.05	0.85	0.99	0.92
14	Kab. Kuningan	0.87	0.71	0.90	1.17	0.95	1.00	0.99
15	Kab. Majalengka	0.80	0.94	0.88	1.14	0.99	1.08	0.93
16	Kota Bandung	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	1.02
17	Kab. Bdg & Kot.Cimahi	1.02	1.02	0.96	0.92	1.10	1.00	1.07
18	Kab. Sumedang	0.96	0.85	1.03	1.23	1.00	1.00	1.12
19	Kab. Garut	0.92	0.94	0.95	1.35	1.04	2.17	1.77
20	Kab/Kota Tasikmalaya	0.88	0.84	0.82	0.92	0.88	1.00	0.89
21	Kab. Ciamis	0.89	1.31	0.89	0.95	0.95	1.00	0.86

3. Indeks BBNKB II

No	Kabupaten/Kota	Sedan	Jeep	Minibus	Bus	Truk	Alat Berat	Motor
1	Kota Depok	1.53	1.90	1.50	1.12	0.97	1.00	1.23
2	Kab. Bogor	1.19	0.81	0.50	0.72	0.34	1.00	0.54
3	Kota Bogor	1.62	1.33	0.96	1.09	0.69	1.00	1.70
4	Kota Sukabumi	0.97	1.18	0.63	0.72	0.47	1.00	1.31
5	Kab. Sukabumi	1.64	1.18	0.61	0.38	0.31	1.00	0.60
6	Kab. Cianjur	2.25	1.44	1.34	3.54	0.84	1.00	1.76
7	Kab/Kota Bekasi	1.56	1.62	1.34	1.29	0.78	1.00	0.91
8	Kab. Karawang	1.25	0.95	0.53	0.21	0.44	1.00	0.48
9	Kab. Purwakarta	2.43	1.76	1.20	4.70	0.77	1.00	0.93
10	Kab. Subang	2.07	1.40	0.77	0.69	0.45	1.00	0.62
11	Kota Cirebon	1.39	1.07	1.09	1.10	0.91	1.00	1.42
12	Kab Cirebon	1.80	1.13	0.67	0.23	0.71	1.00	0.84
13	Kab. Indramayu	1.87	1.11	0.77	1.43	0.73	1.00	1.65
14	Kab. Kuningan	3.09	2.51	2.29	1.94	1.64	1.00	2.28
15	Kab. Majalengka	2.98	1.49	1.57	1.23	1.43	1.00	2.21
16	Kota Bandung	0.82	0.89	0.80	0.81	1.19	1.00	1.07
17	Kab. Bdg & Kot.Cimahi	1.25	1.37	1.32	1.69	0.91	1.00	1.01
18	Kab. Sumedang	1.96	1.61	1.83	1.45	1.35	1.00	1.40
19	Kab. Garut	1.51	0.72	0.90	1.15	0.50	1.00	1.36
20	Kab/Kota Tasikmalaya	1.04	1.16	1.07	1.07	0.95	1.00	1.29
21	Kab. Ciamis	1.45	1.69	1.51	0.60	1.10	1.00	2.28

2. Indeks BBNKB I

No	Kabupaten/Kota	Sedan	Jeep	Minibus	Bus	Truk	Alat Berat	Motor
1	Kota Depok	4.20	1.14	2.46	1.00	2.13	1.00	1.09
2	Kab. Bogor	2.40	0.89	1.51	0.48	1.44	1.00	1.51
3	Kota Bogor	3.27	1.03	2.58	0.68	1.55	0.00	1.90
4	Kota Sukabumi	2.30	0.97	1.41	1.30	0.99	1.00	0.94
5	Kab. Sukabumi	2.62	0.98	1.48	1.77	1.77	1.00	1.51
6	Kab. Cianjur	3.19	0.89	1.10	3.70	1.22	1.00	1.14
7	Kab/Kota Bekasi	3.06	1.19	1.66	1.25	1.71	0.00	1.22
8	Kab. Karawang	40.49	1.12	6.77	0.49	1.16	1.00	1.05
9	Kab. Purwakarta	8.20	0.87	2.75	0.29	1.02	1.00	1.12
10	Kab. Subang	6.61	1.10	2.45	0.75	1.13	1.00	0.85
11	Kota Cirebon	0.07	1.00	0.25	0.66	0.54	1.00	0.58
12	Kab Cirebon	3.87	0.82	1.75	1.00	0.89	1.10	0.80
13	Kab. Indramayu	5.97	0.93	3.69	1.22	1.08	0.00	0.71
14	Kab. Kuningan	2.01	0.79	1.86	0.97	0.69	1.00	0.91
15	Kab. Majalengka	2.52	0.77	1.19	1.72	0.71	0.00	0.77
16	Kota Bandung	0.01	0.98	0.06	0.95	0.75	1.00	0.61
17	Kab. Bdg & Kot.Cimahi	10.26	0.90	3.26	1.00	1.08	1.00	1.07
18	Kab. Sumedang	18.91	1.00	10.57	1.14	0.75	1.00	1.20
19	Kab. Garut	1.01	0.79	1.05	1.45	1.03	0.00	1.07
20	Kab/Kota Tasikmalaya	3.56	0.89	2.10	0.97	0.70	1.00	0.81
21	Kab. Ciamis	1.05	0.78	1.47	0.86	0.66	1.00	0.79

